

**PENGARUH PAD, DAU, DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL
PEMERINTAH DAERAH**

Safiul Huda
*Ati Sumiati
Universitas Negeri Jakarta

ARTICLE INFO

Keywords:
Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Capital Expenditures

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, and Specific Allocation Funds for Capital Expenditures both partially and simultaneously. The subjects in this study were Regency/City Regional Governments in Central Java Province. This research used a sample of 32 regencies/ cities in Central Java originating from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) Report from 2014-2016 obtained from the Directorate General of Fiscal Balance of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The data analysis technique used is multiple linear regression with hypothesis testing using t-statistics and F-statistics and coefficient of determination. The results of the research provide information that Regional Original Income and General Allocation Funds have an effect on Capital Expenditures, while Special Allocation Funds do not affect

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal baik secara parsial maupun simultan. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 32 Kab/Kota di Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2014-2016 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan t-statistik dan F-statistik serta koefisien determinasi. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

How to Cite:

Huda, Safiul dan Ati Sumiati. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14(1), 85-100. <https://doi.org/10.21009/wahana.014.1.6>

PENDAHULUAN

Setelah berjalan 17 tahun pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang efektif berlaku per Januari tahun 2001. Undang-Undang tersebut dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, "Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan" (UU No 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah). Hal ini menandai dimulainya era pembangunan secara mandiri.

Urusan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Kebijakan tersebut akan berdampak pada luasnya hak, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur dari

pemerintah pusat.

Tujuan dari Otonomi Daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pelimpahan wewenang di bidang penerimaan anggaran atau keuangan baik secara administrasi maupun pemanfaatannya yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh pemerintah yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan jumlah yang sangat signifikan adalah salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

Otonomi Daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Otonomi daerah juga berdampak pada optimalnya potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif. Hal ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah secara efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatuhan (PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Wujud

kemandirian daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya tersebut dijabarkan melalui desentralisasi fiskal.

Di Indonesia pelaksanaan desentralisasi fiskal memunculkan persoalan baru dikarenakan tingkat kesiapan fiskal dari masing-masing daerah berbeda. Daerah yang kaya dengan potensi keuangan akan memiliki sumber pendanaan daerah yang semakin besar sehingga daerah tersebut akan semakin maju, sehingga bertolak belakang bagi daerah dengan potensi yang kurang. Dengan adanya otonomi daerah pada pemerintah Kabupaten/ Kota, maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan daerah itu sendiri kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tentunya menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan.

Dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal, salah satu provinsi dengan jumlah penduduknya terbanyak di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Tengah pun harus mencari atau menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi sumber pajak lain dikarenakan realisasi PAD nya tidak mencapai target. Tidak tercapainya target PAD tersebut disebabkan oleh gagalnya pencapaian target pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Khusus Indonesia (Kadin) Jawa Tengah, mengatakan bahwa infrastruktur khususnya jalan raya menjadi persoalan serius di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, wilayah dengan penduduk 35 juta jiwa tersebut dipersiapkan sebagai salah investasi jika infrastrukturnya siap (Bisnis.Com, 2016). Secara umum, minat investor di Jawa Tengah didominasi oleh industri padat karya, sehingga perlu banyak pembangunan infrastruktur yang menungjangnya. Tahun 2016 telah dicanangkan sebagai tahun pembangunan, sehingga pemerintah berupaya keras dalam percepatan pembangunan terutama pada pembanguan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandar udara.

Setiap daerah memiliki kemampuan yang tidak sama dalam hal mendanai segala bentuk kegiatan operasionalnya, akibatnya timbul ketimpangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal (*fiscal gap*) dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, maka pemerintah pusat memberikan Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum

(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Otonomi daerah tidak bisa terlepas dari pelaksanaan pembangunan daerah. Karena merupakan wujud upaya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pembangunan daerah tidak mungkin terwujud tanpa adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Pembangunan fisik dapat dilaksanakan jika perencanaannya dimasukkan kedalam APBD pada pos belanja, khususnya belanja modal.

Alokasi belanja modal diperuntukkan untuk memenuhi sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah, sehingga meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, belanja modal dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah.

Beberapa pertimbangan yang menjadi latar belakang penulis dalam penyusunan penelitian ini antara lain adanya kecenderungan naiknya porsi belanja modal pemerintah daerah yang tidak dibarengi dengan peningkatan pembangunan dan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, serta pengaruh sumber pendapatan pemerintah daerah terhadap belanja modal.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini dibuat dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014- 2016)”. Dan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal?

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS Belanja Modal

Belanja Modal menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Halim (2002) yang dimaksud dengan belanja modal adalah Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Fauzi (2015) mengatakan bahwa belanja yang bersifat kebutuhan publik secara fisik memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2002) PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Menurut Dewi (2002) tahapan identifikasi sumber PAD adalah meneliti, menentukan, dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dengan cara mengidentifikasi sumber PAD tersebut dengan benar diharapkan akan memberikan hasil yang maksimal.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).

Darise (2009) menyatakan bahwa, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU Nomor 33 tahun 2004).

Darise (2009) mengemukakan bahwa “DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah

ditetapkan.” Sedangkan Halim (2002) berpendapat bahwa “DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.”

Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam rangka menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Masa desentralisasi saat ini, pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan PADnya dengan cara memaksimalkan sumber daya yang dimiliki supaya mampu membiayai segala kegiatan baik infrastuktur ataupun sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Daerah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai akan berdampak pada

meningkatnya tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang akhirnya akan meningkatkan PAD itu sendiri.

Peningkatan belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Darise, 2009).

Dengan peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek positif terhadap anggaran belanja modal oleh pemerintah. Selain itu, diharapkan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya meningkatkan partisipasi atau kontribusi publik terhadap pembangunan daerah yang tercermin pada peningkatan PAD.

Berdasarkan teori di atas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H₁: PAD berpengaruh terhadap belanja modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

DAU merupakan salah satu dari Dana Perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN, dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah demi mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pemerintah daerah banyak yang

mengandalkan DAU dikarenakan kemampuan keuangannya lemah sehingga DAU digunakan untuk membiayai segala kegiatan pemerintahannya, karena DAU merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan bantuan umum yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dan menyediakan pelayanan public (Piliang, 2003). Selain itu, DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan daerah termasuk jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD (HAW, 2008).

Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah. Sehingga melalui alokasi dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH) dalam bentuk alokasi belanja daerah baik untuk belanja rutin dan belanja modal, pemerintah daerah dapat menentukan skala prioritas dalam alokasi anggaran tersebut (Mukhlis, 2012).

Berdasarkan teori di atas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H₂: DAU berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

DAK merupakan salah satu Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

Melalui alokasi dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH) dalam bentuk alokasi belanja daerah baik untuk belanja rutin dan belanja modal, pemerintah daerah dapat menentukan skala prioritas dalam alokasi anggaran tersebut (Mukhlis, 2012). Secara khusus DAK digunakan untuk membiayai Belanja Modal yaitu investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis panjang (HAW, 2008).

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan (Marbun, 2005).

Berdasarkan teori di atas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H₃: DAK berpengaruh terhadap belanja modal

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Tujuan tersendiri dari DAK adalah APBD memuat prioritas-prioritas pembangunan, terutama prioritas kebijakan dan target yang akan dicapai melalui belanja daerah (belanja modal) sesuai sumber daya yang tersedia, baik melalui pendapatan asli daerah ataupun melalui skema transfer dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) dari pemerintah pusat (Simanjuntak, 2015)

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (HAW, 2004).

Menurut Sidik (2002), salah satu ciri yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terdapat pada kemampuan keuangan daerah. Dengan arti, daerah otonom harus memiliki kewenangan serta kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

Berdasarkan teori di atas, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah:

H₄: PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan mengenai pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Peneliti memilih Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah sebagai sampel dalam penelitian, sedangkan periode tahun yang digunakan oleh peneliti adalah tahun 2014-2016.

Adapun penggunaan sampel lebih lanjut bergantung kepada pemenuhan persyaratan, seperti:

1. Seluruh kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah mencantumkan jumlah PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal pada Laporan Realisasi APBD.
2. Karakteristik kemampuan keuangan dan geografis yang relatif sama.

Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi APBD, *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sampel yang digunakan sebanyak 32 kab/kota. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan model regresi berganda sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Dalam statistik deskriptif, peneliti dapat memberikan gambaran atau sebuah deskripsi dari suatu data yang dilihat melalui sisi nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum serta *variance*.

Hasil statistik deskriptif pada penelitian ini disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Mini- mum	Maxi- -mum	Mean	Std. Deviation	Varian- ce
PAD	32	152	370	226,9	53,206	2830,870
DAU	32	418	1336	875,7 8	205,807	42356,49 9
DAK	32	45	241	111,6	53,479	2860,039
BM	32	154	532	287,9	88,305	7797,773
Valid N	32					

Sumber: Data diolah penulis, tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa variabel yang memiliki nilai minimum tertinggi adalah DAU sebesar 418, sedangkan nilai minimum terendah adalah DAK sebesar 45. Selanjutnya nilai maksimum tertinggi yaitu DAU sebesar 1.336 sedangkan nilai maksimum terendah adalah DAK sebesar 241. Kemudian nilai rata-rata tertinggi juga DAU sebesar 875,78 sedangkan nilai rata-rata terendah adalah DAK sebesar 111,66. Berikutnya, nilai

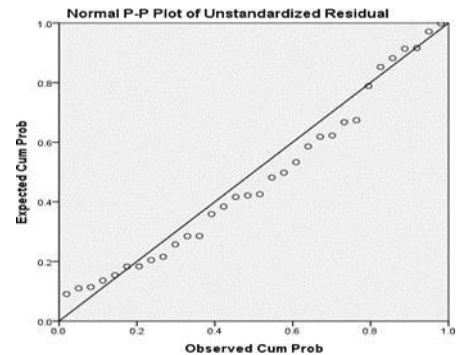
standar deviasi tertinggi adalah DAU sebesar 205.807 sedangkan nilai standar deviasi terendah adalah PAD sebesar 53,206 kemudian nilai variance tertinggi adalah DAU dan terendah adalah PAD.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam variabel pengganggu atau residualnya dapat terdistribusi secara normal atau tidak. Peneliti menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Besaran *Kolmogorov-Smirnov* yang dihasilkan oleh penelitian ini adalah 0,135 dengan tingkat signifikansi 0,147. Tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini mengartikan bahwa penyebaran data terdistribusi secara normal. Selain itu, peneliti juga melakukan uji normalitas dengan *Probability Plot* untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak.

Hasil uji normalitas dengan *Probability Plot* terdapat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1

Hasil Uji Normalitas – Probability Plot

Sumber: Data diolah penulis, tahun 2018

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik data tidak menjauhi garis diagonal atau penyebaran titik-titik berada pada sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai VIF yang kurang dari 10,0 untuk masing-masing variabelnya, yaitu dengan nilai PAD sebesar 1,323, DAU sebesar 1,563 dan DAK sebesar 1,210. Hal ini terlihat jelas bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah terdapat korelasi maka dilakukan juga Uji *Durbin-Watson* dengan model regresi $dU < dW < 4-dU$. Untuk taraf signifikansi sebesar 0,05 dengan jumlah sampel (n) 32 dan 3 variabel independen (k=3), didapat nilai dL sebesar 1,2437 dan dU sebesar 1,6505 maka $4-dU$ sebesar 2,3495.

Hasil uji Autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* yang telah dilakukan peneliti diperoleh dengan hasil $dU < DW < 4-dU = 6505 < 2,059 < 2,3495$. Maka dapat dikatakan hasil analisa menunjukkan tidak adanya autokorelasi dalam data sampel.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas penelitian ini dilakukan dengan uji *Glejser*. Prediksi dilakukan dengan meregresikan independen dengan *variable absolute residual* dari tiga variabel independen yaitu PAD, DAU, dan DAK yang menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 masing-masing 0,628, 0,416 dan 0,445. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi yang dihasilkan maka menghasilkan juga persamaan model regresi seperti:

$$Y = 51,953 + 0,386 X_1 + 0,150 X_2 + 0,154 X_3 + e$$

Dari persamaan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 51,953 memiliki makna ketika PAD, DAU dan DAK setara dengan nol maka belanja modal memiliki nilai 51,953.
2. Koefisien variabel PAD sebesar 0,386 memiliki makna ketika PAD meningkat 1 satuan dan variabel lain mempunyai nilai 0, maka belanja modal akan bertambah sebesar 0,386.
3. Koefisien variabel DAU sebesar 0,150 memiliki makna ketika DAU meningkat 1 satuan dan variabel lain mempunyai nilai 0 maka belanja modal akan bertambah sebesar 0,150.
4. Koefisien variabel DAK sebesar 0,154 memiliki makna ketika DAK

meningkat 1 satuan dan variabel lain mempunyai nilai 0 maka belanja modal akan bertambah sebesar 0,154.

Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t dari pengaruh PAD terhadap belanja modal diperoleh t_{hitung} untuk PAD sebesar 2,481, sedangkan t_{tabel} dengan signifikansi 0,05 dengan df (n-k-1) atau 32-3-1 = 28 adalah sebesar 2,048. Maka t_{hitung} 2,481 > t_{tabel} 2,048, sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal dan hipotesis pertama diterima.

2. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t dari pengaruh DAU terhadap belanja modal diperoleh t_{hitung} untuk DAU sebesar 3,161, sedangkan t_{tabel} dengan signifikansi 0,05 dengan df (n-k-1) atau 32-3-1 = 28 adalah sebesar 2,048. Maka t_{hitung} 3,161 > t_{tabel} 2,048, sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal dan hipotesis kedua diterima.

3. Pengujian pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t dari pengaruh

DAK terhadap belanja modal diperoleh t_{hitung} untuk PAD sebesar 1,481, sedangkan t_{tabel} dengan signifikansi 0,05 dengan df (n-k-1) atau 32-3-1 = 28 adalah sebesar 2,048. Maka t_{hitung} 1,481 < t_{tabel} 2,048, sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan hipotesis ketiga tidak diterima.

Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Hasil uji F dari penelitian ini memperoleh F_{hitung} sebesar 3,902, sedangkan F_{tabel} dapat diketahui pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 dimana df (k; n-k). k merupakan jumlah variabel bebas dan n merupakan jumlah sampel, df (3; 29) sebesar 2,93. Maka F_{hitung} 3,902 > F_{tabel} 2,93, sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. Nilai signifikansi juga menunjukkan sebesar 0,019 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal dan dapat digeneralisasi untuk seluruh populasi selain yang terdapat di Kab/Kota Jawa Tengah.

Uji Korelasi Simultan

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai R yaitu 0,543 yang berarti bahwa nilai R termasuk dalam kategori 0,400-0,600 maka

keeratan PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal tergolong sedang.

korelasi termasuk kedalam kategori sangat rendah.

Uji Korelasi Parsial

1. X_1 terhadap Y

Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi antara PAD terhadap BM adalah sebesar 0,789 yang berarti bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal dan berdasarkan pada pedoman interpretasi koefisien korelasi termasuk kedalam kategori kuat.

2. X_2 Terhadap Y

Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi antara dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal (BM) adalah sebesar 0,389 yang berarti bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal (BM) dan tingkat hubungannya berdasarkan pada pedoman interpretasi koefisien korelasi termasuk kedalam kategori rendah.

3. X_3 Terhadap Y

Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi antara dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal adalah sebesar 0,098 yang berarti bahwa dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal (BM) dan tingkat hubungannya berdasarkan pada pedoman interpretasi koefisien

Uji Koefisien Determinasi

Hasil penelitian menunjukkan nilai *R-Square* atau pengaruh antara PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal sebesar 0,295. Jadi kemampuan dari variabel PAD, DAU dan DAK untuk menjelaskan Belanja Modal secara simultan sebesar 29,5%, sedangkan sisanya sebesar 70,5% menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi belanja modal.

Pembahasan

Berikut ini penjelasan mengenai pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen:

1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini konsisten terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tuasikal, (2008) bahwa PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

PAD merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari sumber-sumber kekayaan dalam wilayah atau daerah itu sendiri. PAD merupakan indikator pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan publik kepada

masyarakat. Sehingga semakin besar PAD maka akan semakin besar pula belanja modal yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

2. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Salawali, dkk (2016). Hasil temuan ini juga mendukung temuan sebelumnya yaitu Martini, dkk (2014) yang menyatakan bahwa DAU sangat berpengaruh terhadap belanja modal. Pengaruh tersebut disebabkan karena adanya DAU dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah mampu mengalokasikan pendapatannya tersebut untuk membiayai belanja modal.

DAU adalah salah satu sumber pendapatan daerah menilai menilai kemandirian suatu daerah dan tolak ukur untuk keberhasilan. Sehingga semakin besar DAU maka akan semakin besar pula belanja modal daerah tersebut.

3. Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Trisnawati dan Vitta (2015). Pendapat yang sama juga telah ditemukan oleh Budi S dan Rofiq (2013) di provinsi Jawa timur bahwa DAU tidak

berpengaruh terhadap belanja modal.

DAK juga merupakan dana yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan secara khusus untuk program prioritas pemerintah pusat dalam rangka pembangunan nasional sehingga diharapkan pembangunan secara fisik di daerah setiap tahunnya meningkat pula. Dalam kenyataannya dengan jumlah DAK yang diterima Pemerintah daerah cukup besar tidak diimbangi dengan efektifnya tatakelola implementasi DAK bagi pembangunan di daerah. Justru DAK yang begitu besar diterima oleh pemerintah daerah masih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai bukan untuk belanja modal.

4. Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Tuasikal (2008) dengan penelitian Martini (2014). Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin besar PAD, DAU dan DAK sebagai sumber penerimaan daerah maka semakin besar pula dana yang dikeluarkan untuk belanja modal. Hal ini disebabkan untuk membiayai penyediaan kebutuhan publik sebagai salah satu unsur yang mendorongperubahankualitas

pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, maka peran dana perimbangan yaitu DAU dan DAK sangat signifikan untuk membiayai belanja daerah khususnya belanja yang menyediakan pelayanan publik yaitu belanja modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh serta pembahasan dari hasil penelitian, maka kesimpulan yang diperoleh peneliti adalah:

1. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Artinya jika nilai PAD dan DAU meningkat, maka nilai belanja modal tersebut juga akan meningkat dan begitupun sebaliknya.
2. Hasil pengujian hipotesis juga membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
3. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa ketiga variabel yaitu PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran

yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi beberapa pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi pemerintah daerah, mengingat PAD memiliki pengaruh terhadap perkembangan belanja modal di Kab/ Kota Provinsi Jawa Tengah, maka peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam sumber-sumber PAD harus lebih diintensifkan, terutama di sektor pajak dan retribusi daerah. Sedangkan dari sisi dana perimbangan perlu manajemen dan perencanaan yang baik pula guna memaksimalkan dana dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran pemerintah pada sektor publik.
2. Manajemen pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk pos belanja modal perlu diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan publik yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar kelak dapat menggunakan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga dapat dilakukan generalisasi secara tepat. Penelitian berikutnya juga diharapkan mampu meneliti variable lainnya yang mempengaruhi belanja modal, seperti dana bagi hasil, PDRB, SILPA, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). Retrieved from beritasatu.com: <http://m.beritasatu.com/ekonomi/232211-jokowi-diminta-perhatikan>.
- (n.d.). Retrieved from <http://jateng.bps.go.id>
- (n.d.). Retrieved from www.djpk.kemenkeu.go.id
- (2016, April 04). Retrieved April 14, 2017, from Bisnis.Com: <http://semarang.bisnis.com/read/20160413/2/86436/>
- (2016, September 23). Retrieved April 10, 2017, from Kabarnusantara.net: <http://kabarnusantara.net/2016/09/23/dpd-minta-alokasi-dak-tepat-sasaran/>
- (2016, April 13). Retrieved from Bisnis.com: <http://semarang.bisnis.com/read/20160413/2/86436/infrastruktur-jadi-pr-besar-dijawa-tengah.inilah.18.daftar.Program.Prioritas.2017>
- (2016, Mei 27). Retrieved from Republika.co.id: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/05/27/o7tyb6361-jawa-tenga-diminta-gali-potensi-sumber-pajak-lain>
- (2016, Agustus 24). Retrieved from Bisnis.com: <http://industri.bisnis.com/read/20160824/45/578140/kualitas-infrastruktur>
- (2017). Retrieved from Kontan.co.id: <http://kontan.co.id/news/inilah-18-daftar-program-prioritas-2017>. Jawa Tengah Diminta Gali Potensi Sumber Pajaklain
- Abdullah, S. (2009). *Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kab/Kota di Jawa dan Bali*. Yogyakarta: UGM.
- Ardhani, P. (2011). PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi*.
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta: Indeks.
- Dew, E. (2002). Sumber endapatan asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi daerah. *Jurnal Ilmiah Identifikasi*.
- Dewi, E. (2011). *Dewi, Elita. 2002. Jurnal Ilmiah Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Sumatera Utara: USU.
- Simanjuntak, Entarina D. (2015). *Pemantauan Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Umum*. Jakarta: Kajian Kementerian PU.
- Fauzi, H. N. (2015). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: LPP UNJ.
- Ghazali, I. (2009). *Ghozali, Imam. 2009. Ekonometrika Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, N. D. (2003). *Basic Econometrics*. USA: Mc Graw Hill.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, S. A. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- HAW, W. (2004). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HAW, W. (2008). *Penyelenggaraan Otonomi*

di Indonesia. Jakarta: Raja grafindo Persada.

Rasdianto, O. S. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual* . Jakarta: Salemba Empat.

Indra J. Piliang, D. (2003). *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.

Sabarno, H. (2007). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta: sinar Grafika.

Juwaini, J. (2007). *Otonomi Sepenuh Hati*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat.

Kuncoro, M. (2014). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Kusufi, A. H. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.

Kusufi, A. H. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4* . Jakarta: Salemba empat.

Marbun, B. (2005). *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Marbun, B. (2005). *Otonomi Daerah 1945-2005: Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

Mukhlis, T. H. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembanguna Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Oentarto, D. (2004). *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*. Jakarta: Samitra Media Utama.

PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (n.d.).

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (n.d.).

Ramdani, I. J. (2003). *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.